



Sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 91,14 Triliun

Gambir, Warta Kota

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025. Anggaran yang disetujui itu mencapai Rp 91,14 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, nilai APBD itu terdiri dari pendapatan daerah Rp 81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,45 triliun.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp 82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,81 triliun.

"Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,14 triliun apakah dapat disetujui?" tanya Khoirudin dalam rapat Banggar, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Setuju" jawab seluruh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Setelah melalui pembahasan panjang, ungkap dia, tahapan selanjutnya yakni penandatanganan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (1/11/2024).

"Pelaksanaan penandatanganan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024," ucap Khoirudin.



DPRD DKI Jakarta

Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi pekan lalu.

Pertama, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak CCTV dan petugasnya.

Permintaan itu masih sangat minimnya kebutuhan Managed Service CCTV, khususnya untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas.

"Komisi A mengingatkan pentingnya untuk menyediakan tenaga monitoring yang memadai," ucap Mujiyono.

Kemudian Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh merekomendasikan agar PT Food Station Tjipinang Jaya mengantisipasi ketersediaan pangan menjelang tahun baru, natal, dan pelaksanaan Pilkada.

Sebab pada momentum tersebut, biasanya memicu peningkatan permintaan pangan yang signifikan.

"Karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan," ucap Nova.

Lalu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov bisa terdata, terkontrol dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Mendorong BPAD untuk mengambil alih aset-aset daerah yang tidak digunakan dengan baik atau tidak menghasilkan pendapatan agar dialihkan kepada pihak ketiga (dikerjasamakan), sehingga aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah," kata Suhud. (faf)